

NASKAH PUBLIKASI

**PERSEPSI PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

(Studi Kasus dan Perbandingan Pengelolaan Keuangan di Desa Ngargomulyo,
Desa Keningar dan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2017)

disusun oleh :

MUHAMMAD ARIFIN JALIL

NIM 20140520059

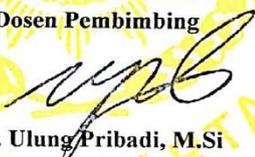
Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 15 Desember 2017

Tempat : Ruang IGOV lama

Waktu : 10.00 WIB

Dosen Pembimbing


Dr. Ulung Pribadi, M.Si

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik**



Dr. Tina Purwaningsih, S.IP., M.Si

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

Muhammadarifinjalil_20140520059_Faktor-
FaktoryangMemepengaruhiPengelolaanKeuanganDesa_IP_UMY

**PERSEPSI PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA NGARGOMULYO, DESA KENINGAR, DESA DUKU,
KECAMATAN DUKUN, KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016-2017)**

Muhammad Arifin Jalil

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Indonesia

muhammad.arifin.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Keuangan Desa Merupakan keseluruhan dari semua hasil penerimaan keuangan oleh desa dari sumber-sumber yang sah. Dalam pengeolaan keuangan desa tentu memiliki faktor yang menghambat pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai peraturan yang berlaku akan berdampak pada keuangan desa. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa tentu sangat memepengaruhi pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang tujuannya agar penelitian ini mendapatkan data yang lebih kuat. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ngargomulyo, Desa Dukun, Desa Keningar dalam pengelolaanya menggunakan siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh ke tiga desa tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan desa di desa Ngargomulyo, Desa Dukun, Desa Keningar selalu melibatkan semua unsur masyarakat agar masyarakat memiliki rasa percaya kepada pemerintah desa. Peran BPD juga sangat terlihat dalam pengelolan keuangan desa sebagai pengawas palaksanaan bersama masyarakat. Namun keuangan desa di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun sumber daya manusia memiliki pengaruh yang besar

terhadap pengelolaan keuangan desa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia perlu adanya pelatihan yang perlu dilkakukan oleh pemerinth Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia.

Kata Kunci : *Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa*

ABSTRACT

Village Finance Is the whole of all the results of village's financial acceptance from legitimate sources. In pengeolaan village finance certainly has a factor that hampers the management of village finances. Management of village finances that do not comply with the prevailing regulations will have an impact on village finances. The human resources owned by the village government certainly affect the management of village finances. In this study, using qualitative and quantitative methods with the aim of this research to get stronger data. The results of this study show that in the management of village finances in Ngargomulyo Village, Dukun Village, Keningar Village in its management using the cycle of village financial management, from the planning, implementation, administration, reporting and accountability have been implemented by the three villages well and accordingly with applicable regulations. In the management of village finances in the village of Ngargomulyo, Dukun Village, Keningar Village always involves all elements of society so that people have a sense of trust to the village government. The role of BPD is also very visible in the management of village finances as supervisors of community co-operation. However, village finances in Ngargomulyo Village, Keningar Village, Dukun Village human resources have a great influence on village financial management. The low quality of human resources needs a training that needs to be done by the Magelang regency government to improve the quality of human resources.

Keywords: *Factors Affecting Village Financial Management*

I. Pendahuluan

Desa merupakan penyelenggara pemerintahan terkecil di Indonesia yang hubungannya sangat dekat dengan masyarakat. Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Perwakilan Desa, serta Beberapa Kaur dan perangkat lainnya. Perangkat Desa tersebut sama sama bersama masyarakat untuk membangun Desanya agar dapat berkebang bahkan menjadi desa terbaik. Tolak ukur sebuah negara maju dapat dilihat dari Desa yang maju terlebih dahulu, karena itu desa menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemimpin Negara berhasil atau tidaknya. Tolak ukur tersebut dapat meliputi dalam beberapa aspek penilaian yakni : Infrastruktur yang baik, kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi, tingkat pendidikan yang relatif tinggi, aspek kesehatan yang baik juga tentunya, pembangunan secara fisik maupun yang non fisik, hal hal tersebutlah yang menjadi instrumental penilaian Desa yang baik. Pembangunan masyarakat desa akhir akhir ini oleh Pemerintah Pusat sangat di tekankan karena dengan membangun Desa sama dengan mensukseskan pembangunan Daerah maupun Negara.

Keuangan Desa merupakan semua penerimaan, aset desa yang dapat dirupiahkan yang dikelola oleh Desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Keuangan Desa yang memiliki banyak sumber tersebut perlu pengelolaan Keuangan secara baik. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Di Kabupaten Magelang sendiri Dana Desa telah di salurkan kepada 210 desa dari total desa yang ada di Kabupaten Magelang sebanyak 367 desa. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 sebesar 91%. Pada tahun sebelumnya Dana Desa

di Kabupaten Magelang mendapatkan Rp.118 miliar, Sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan Rp.124 miliar sehingga setiap desanya pada tahun 2016 mendapatkan Rp. 600-800 Juta (nasional.republika.co.id 04/10/2017 pukul 21.13).

Namun dalam pengelolaann keuangan Desa tersebut di tiap-tiap Desa di Kabupaten Magelang masih ditemukan permasalahan terkait pengelolaan dana Desa seperti dikutip dari borobudurnews.com bahwa kepala Inspektorat Kabupaten Magelang Ismu Wulandari mengatakan “penggunaan keuangan desa di Kabupaten Magelang belum optimal terutama Dana Desa belum bisa menyerap anggaran secara baik dan banyak silpa ditahun 2016 yang tidak terserap dimasukan ditahun berikutnya. Selain itu ia juga mengatakan bahwa masih banyak desa yang menyusun SPJ belum baik serta sistem pengelolaan keuangan secara online padahal hal tersebut sangat penting bagi pengawasan”.

Pengelolaan keuangan Desa di Desa Ngargomulyo pada tahun 2016 memiliki Silpa sebesar Rp. 14.018.000, tentu saja ini dalah indikasi dari ketidak berhasilan program atau tidak terlaksananya program pemerintah desa Ngargomulyo. Selanjutnya di Desa Keningar dalam penggunaan keuangan desa tahun 2016 memiliki Silpa sebesar Rp. 34. 582,826. Sebaliknya pada Desa Dukun pada anggran tahun 2017 memiliki Defisit sebesar Rp. 2.000.000, dengan adanya defisit yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Dukun berarti terdapat program yang kekurangan anggaran atau terdapat anggaran yang tidak terduga. Keuangan desa yang semestinya dimanfaatkan dengan baik serta harus diperuntuhkan untuk pembangunan desa namun dalam kenyataannya di Desa Ngargomulyo dan Desa Keningar terdapat Silpa yang cukup banyak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian ini diantaranya sebai berikut : 1.Bagaimana pengelolaan keuangan Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017?, 2.Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan keuangan Desa Ngargomulyo, Desa Keningar dan Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017?

II. Kerangka Teori

1. Persepsi

Bimo Walgito (dalam Lestari, 2015 : 8-9) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Lestari, 2015).

2. Desa

Menurut Zakaria (dalam Candra, 2014 : 12-13) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Desa disebut juga wilayah yang memiliki batas tertentu baik berupa fisik maupun kasat mata yang memiliki unsur tanah, air yang memiliki manfaat sebagai sumber mencari nafkah.

Sedangkan menurut Sriarta (dalam Wida,2016:14) berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap desa, maka desa dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis :

1. Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan suatu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara memngadakan sendiri. Ciri-ciri masyarakat desa swadaya adalah masyarakatnya memegang teguh adat istiadat desanya, terisolir dari daerah lainnya,memiliki penduduk yang masih jarang atau belum padat serta masyarakat yang bermata pencaharian yang bersifat agraris.

2. Desa Swakarya

Desa Swakarya ialah desa yang telah memenuhi kebutuhannya secara sendiri, kelebihan bahan produksi dari desanya telah dipasarkan kedaerah lain. Ciri-ciri dari desa swakarya adalah masyarakatnya sudah mulai terlepas dari adat istiadat,memiliki sarana dan prasarana desa yang cukup baik,serta adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan pola pikir masyarakat.

3. Desa Swasembada

Desa swasembada merupakan desa yang lebih maju serta mampu mengembangkan potensi yang ada didesanya baik sumberdaya alamnya maupun sumberdaya manusianya, masyarakatnya dengan mata pencaharian yang homogen, memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta kemajuan teknologi yang modern.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota (Wida, 2016).

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Muhammad Arif (2006:32) ia menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan Keuangan Desa.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2015) Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban Keuangan Desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik oleh penyelenggara desa, maka pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



(Sumber: bppk.kemenkeu.go.id diunduh pada 11/10/2017 pukul 20.30)

Gambar diatas menjelaskan bagaimana siklus pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana mestinya (Bpkp, 2015).

1. Perencanaan

Langkah awal dalam proses pembangunan desa adalah perencanaan. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa yang meliputi RPJMDes dan RKPDes yang telah disusun secara berjangka dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Selain itu perencanaan tentunya melibatkan masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dibuat sebuah kebijakan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penggunaan Keuangan Desa pemerintah Desa Harus memperhatikan jumlah besaran Belanja Desa yang telah disuapkan berdasarkan APBDDes. Seperti yang telah diatur dalam PP No 43 Tahun 2014 bahwa Dana Desa digunakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggran belanja desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan.
- b. Paling banak 30% dari anggaan belanja desa digunakan untuk gaji dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa.

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perengakat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

3. Penatausahaan

Dalam proses penatausahaan Bendahara Desa wajib untuk mencatat dan melaporkan setiap proses penerimaan maupun pengeluaran Keuangan Desa. Penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran harus menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Untuk mempertanggungjawabkan Keuangan Desa yang telah digunakan maka bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, fungsi serta kewajibannya maka Kepala Desa memiliki kewajiban melaporkan atas penggunaan Keuangan Desa dalam satu tahun Kepada Bupati/Walikota melalui Camat :

- a. Laporan semester pertama, yang berupa laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, yang berupa Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir.

Pelaporan atau transparansi atas penggunaan Keuangan Desa bukan hanya kepada Bupati/Walikota melainkan kepada :

- a. Perangkat desa
- b. Masyarakat secara luas melalui transparansi Keuangan Desa

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban yang telah diserahkan kepada Bupati/Walikota kemudian juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa serta dipublikasikan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Desa (SID) atau dalam bentuk edaran sehingga masyarakat mampu mengetahui pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desanya untuk melakukan berbagai kebijakan bagi masyarakat.

4. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Sulastri (2016 :84-85) ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas menjadi penghambat dalam pengelolaan Keuangan Desa, ditambah lagi dengan rendahnya kualitas pendidikan sumber daya manusia yang ada menjadikan kendala dalam memenuhi standart kompetensi pegawai. Kurangnya pengalaman kerja menjadi faktor pendukung lemahnya sumber daya manusia dimana kompetensi pegawai menjadi kuraang terutama dalam pengoprasionalan komputerisasi. Tidak jarang desa yang kekurangan sumberdaya manusia yang baik dalam pengelolaan Keuangan Desa pihaknya menggunakan pihak ketiga.

b. Informasi

Informasi merupakan bagian terpenting bagi pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus memberikan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa. Terlebih sekarang desa telah memiliki sistem informasi desa masing masing, maka pemanfaatan sistem informasi desa harus dilakukan dengan benar untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa semakin meningkat. Selaian sebagai sistem informasi *website* desa juga sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada pihak manapun.

c. Partisipasi Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Desa sangatlah peting, masyarakat merupakan aktor utama daam pengguna Keuangan Desa sehingga peran sertanya dalam pengelolaan Keuangan Desa sangat dibutuhkan. Masyarakat dapat memberikann partisipasinya dalam pembuatan kebijakan serta dapat mejadi pengawas langsung dalaam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Perangkat Desa.

Namun beda dengan kenyataanya masyarakat lebih percaya dengan kondisi keuangan yang dikelola oleh Perangkat Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Desa terbukti sangatlah rendah hal ini juga dukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan yang mengatakan hal yang serupa.

Menurut Mardikanto (dalam Istiana, 2017 : 18-19) faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa adalah :

1. Kesempatan

Banyak program yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa namun partisipasi masyarakat sangat kurang yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kurangnya informasi yang disampaikan oleh masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat untuk berpartisipasi. Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah :

- a. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan
- b. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
- c. Kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur yang harus dilaksanakan.
- d. Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu mengembangkan, menumbuhkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat.

2. Kemampuan

Perlu disadari bahwa dengan adanya kesempatan yang telah tersedia untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak berarti banyak jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan Desa. Ada sebagian masyarakat yang memiliki kesempatan namun dalam hal kemampuan untuk ikut serta dalam pengelolaan Keuangan Dsa sangatlah rendah. Kemampuan selanjutnya juga bisa diartikan sebagai kurangnya kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

3. Kemauan

Kemauan berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap dan mental masing masing setiap masyarakat yang memiliki tekad untuk memperbaiki kehidupannya serta kehidupan masyarakat luas. Ada sebagian masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa namun kurang memiliki

kemauan dalam kata lain masyarakat masih menitik beratkan pekerjaan mereka dari pada untuk memperbaiki desanya serta kehidupannya serta keluarganya.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif . Menurut Sugiono (2015) Data kualitatif diperoleh dari data *reduction* (Reduksi Data) , data *display* (Penyajian Data) , dan data *conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan) . Sedangkan menurut Sumanto (1995 : 240-243) didalam teknik analisis data dengan jenis penelitian kuantitatif yaitu dengan dua cara yaitu Korelasi dan Regresi. Tujuan penggunaan dua metode ini adalah agar hasil penelitian ini di perkuat dengan data yang di peroleh dari hasil wawancara, dokumen desa serta dari hasil data yang di peroleh melalui kuesioner.

IV. Pembahasan

1. Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Pada bagian ini penulis membandingkan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun pada tahun 2016-2017. Pada bagian ini merupakan hasil dari wawancara serta hasil dari kuesioner yang telah penulis analisis sehingga menjadi seperti tabel dibawah ini.

No	Desa Ngargomulyo	Desa Keningar	Desa Dukun
1	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Ngargomulyo selalu melibatkan masyarakat umum serta semua elemen yang ada di masyarakat. - Perencanaan pembangunan desa selalu diawali dengan musyawarah tingkat dusun yang kemudian dilanjutkan di musyawarah tingkat desa yaitu musrembangdesa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Ngargomulyo selalu melibatkan masyarakat umum serta semua elemen yang ada di masyarakat. - Perencanaan pembangunan desa selalu diawali dengan musyawarah tingkat dusun yang kemudian dilanjutkan di musyawarah tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> -Perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Ngargomulyo selalu melibatkan masyarakat umum serta semua elemen yang ada di masyarakat, termasuk Polsek, Koramil, dan juga pihak kecamatan. Tujuannya agar semua aspirasi masyarakat dapat terjaring dengan baik. -Perencanaan pembangunan desa selalu diawali dengan musyawarah tingkat

		desa yaitu musrembangdesa	dusun yang kemudian dilanjutkan di musyawarah tingkat desa yaitu musrembangdesa
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program pemerintah desa Ngargomulyo melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam pengimplementasian khususnya program pembangunan yang berupa bangunan fisik. - Pada tahun 2016 Desa Ngargomulyo memiliki Silpa Rp. 14.018.000, namun Silpa ini bukan bersumber dari Dana Desa yang harus dikembalikan jika memiliki sisa lebih. Silpa yang terjadi didasari oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa Ngargomulyo sehingga tidak dapat mengcover semua kegiatan yang dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program pemerintah desa Keningar melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam pengimplementasian khususnya program pembangunan yang berupa bangunan fisik. - Pada tahun 2016 Desa Keningar memiliki Silpa Rp. 34.528.826, namun Silpa ini bukan bersumber dari Dana Desa yang harus dikembalikan jika memiliki sisa lebih. Silpa yang terjadi di Desa Keningar karena adanya program yang tidak berjalan karena terkendala oleh waktu pelaksanaannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan program pemerintah desa Dukun melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam pengimplementasian khususnya program pembangunan yang berupa bangunan fisik. - Pada tahun 2017 Desa Dukun memiliki Defisit Rp. 2.000.000, adanya Defisit ini karena adanya pengeluaran yang tidak terduga oleh pemerintah desa Dukun
3	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngargomulyo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bendahara desa telah melakukan pencatatan dari semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan - Hambatan yang dialami oleh bendahara desa adalah belum memiliki kemampuan dalam pencatatan buku adminstrasi dan buku 	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Keningar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bendahara desa telah melakukan pencatatan dari semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. - Hambatan bendahara desa Keningar kurang memiliki ketrampilan yang cukup 	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Keningar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bendahara desa telah melakukan pencatatan dari semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. - Bendahara desa tidak memiliki kendala karena bendahara desa memiliki pendidikan yang cukup untuk

	bank namun hal tersebut dapat di atasi dengan Pelatihan yang di adakan oleh pemerintah daerah		melakukan tugas pokok dan fungsi bendahara.
4	<p>Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa Ngargomulyo telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah tepat waktu dalam proses pelaporannya</p> <p>Pemerintah desa Ngargomulyo telah transparansi kepada masyarakat melalui papan informasi desa dan juga wesbiste resmi desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Keningar telah sesuai dengan prosedur dan melakukan pelaporan dua kali selama satu tahun anggaran - Pelaporan dilakukan secara tepat waktu jika uang transfer dari pemerintah Dearah tepat waktu, jika transfer pemerintah daerah mengalami keterlambatan maka pelaporan keuangan juga terlambat juga. - Pemerintah desa kurang transparansi dalam melaporkan keuangan dengan tidak membuat papan informasi rincian APBDes maupun melalui wesite desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Dukun selalu tepat waktu - Pemerintah desa Dukun telah melakukan transparansi kepada masyarakat dengan melakukan pemasangan spanduk tentang rincian APBDes diberbagai tempat di Desa agar semua masyarakat mengetahui besaran penerimaan dan pengeluaran desa. - Namun kepada peneliti atau pihak luar pemerintah desa Dukun belum terbuka karena saat peneliti melakukan penelitian, peneliti tidak mendapatkan data keuangan yang penulis butuhkan secara lebih detail.
5	Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ngargomulyo masih memiliki kekurangan di beberapa posisi jabatan sehingga mengakibatkan pelayanan baik administrasi maupun secara sturktural menjadi tidak maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa Keningar selain kurangnya perangkat desa dan juga kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa Keningar terutama dalam pengoprasionalan komputer 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Desa Dukun sangat baik, terlebih pemerintah Desa Dukun mengutamakan perangkat yang mampu dan lebih paham terhadap IT di era modern ini.

6	<p>Pemerintah desa Ngargomulyo telah memberikan informasi dan sosialisasi melalui semua perasngkat maupun melalui papan informasi dalam rangka untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat yang baik</p> <p>Pemerintah desa Ngargomulyo telah memanfaatkan sistem informasi desa dengan baik dan selalu aktif mengikuti pelatihan untuk mengembangkan sistem informasi desa yang lebih baik lagi</p>	<p>- Pemerintah desa Keningar telah memberikan informasi apapun kepada masyarakat melalui perangkat desa sebagai penyambung lidah kepala desa</p> <p>- Pemerintah desa belum memanfaatkan sistem informasi desa dengan baik, hal ini dapat terlihat wesite desa yang belum memiliki konten yang berkaitan dengan desa yang bersangkutan</p>	<p>- Pemerintah desa Dukun selalu memberikan informasi teruptodate agar masyarakat tidak tertinggal informasi yang penting untuk mereka ketahui</p> <p>- Pemerintah desa Dukun telah memanfaatkan sistem informasi desa dengan baik namun hanya saja pemerintah desa Dukun tidak mencantumkan rincian APBDes di website resmi desa sehingga pihak luar tidak dapat mengetahui keuangan desa Dukun.</p>
7	<p>Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah tinggi dan sangat antusias</p>	<p>- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah tinggi dan sangat antusias meskipun hanya kaum wanita yang mendominasi di Desa Keningar.</p>	<p>- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah tinggi dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang pemerintah desa adakan.</p>

V. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pada tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melibatkan masyarakat sebagai objek utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Serta keuangan yang menjadi pendapatan masing masing desa telah di alokasikan kepada 4 bidang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, bidang

pemberdayaan masyarakat. Keuangan Desa yang telah pemerintah berikan kepada pemerintah desa seharusnya dimanfaatkan dengan cukup tidak kurang atau lebih dengan cara menyusun program dengan waktu pelaksanaannya dengan baik. Secara transparansinya ketiga desa ini sudah cukup baik namun pada Desa Dukun transparansi kepada pihak lain atau peneliti belum dilakukan secara baik hal tersebut terlihat juga dengan tidak menginput data APBDes kedalam *website* resmi desa. Untuk desa Keningar secara transparansinya baru dilakukan beberapa bulan terakhir, serta *website* desa yang tidak di fungsikan dengan baik. Serta penulis tidak diperbolehkan meminta data keuangan desa di Desa Dukun dan Desa Keningar pada Tahun 2016. Namun, untuk desa Ngargomulyo pemerintah Desa sangat terbuka dengan pihak luar seperti peneliti sehingga peneliti mendapatkan data keuangan yang peneliti butuhkan serta data rencana kerja pembangunan desa Ngargomulyo, seharusnya ini dapat dicontoh untuk desa yang lain.

Untuk faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa Sumber daya manusia, Informasi, Partisipasi masyarakat, semua faktor tersebut memiliki peran andil yang besar dalam pengelolaan keuangan desa, terutama adalah faktor sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Daftar Pustaka

- Bpkp. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Candra Kusuma Putra, R. N. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa . *Jurnal Administrasi Publik* , vol I, No. 6., 12-13.

- Istiana, S. (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus Desa Sendang Rejo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman).
- Lestari, R. B. (2015). Persepsi santri terhadap hadîs tentang salât tasbîh dan implementasinya (studi kasus pondok pesantren putri Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang). (*Doctoral dissertation, UIN Walisongo*), 8-9.
- Milanti, S. (2016). Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kab. Bantul Tahun 2015). *Skripsi UMY*, 2-5.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*, 3.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*. Bandung: ALFABETA.
- Sulastrri, N. (2016). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Hau Oleo Kendari*, 13-16.
- Wida, S. A. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Universitas Jember*, 32-39.

Refrensi Website:

<http://borobudurnews.com>

<http://bppk.kemenkeu.go.id>

[http:// http://desadukun.magelang.go.id](http://desadukun.magelang.go.id)

<http://desakeningar.magelang.go.id>

<http://responsitory.umi.ac.id>

<http://nasional.republika.co.id>

<http://desangargomulyo.magelangkab.go.id>